

RINGKASAN LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
MALINAU, KALIMANTAN UTARA**

MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



FRONIKA ROSITA

11.19.30714

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA 2022**

TUGAS AKHIR

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FRONIKA ROSITA

Nomor Induk Mahasiswa: 111930714

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

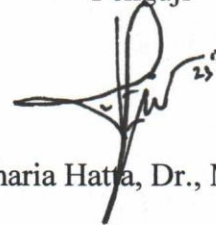
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Cahyo Indraswono, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Penguji



Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 13 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INTISARI

Laporan ini menjelaskan kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis selama tiga bulan mulai dari tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 November 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Selama pelaksanaan kegiatan magang berlangsung, penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi. Kegiatan magang dilakukan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE YKPN. Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan magang meliputi melakukan pengarsipan beberapa dokumen, rekapitulasi realisasi penyaluran dana desa, rekonsiliasi beberapa dokumen, melengkapi dokumen rekonsiliasi LRA 2022, dan melakukan pengarsipan dokumen SP2D. selama melaksanakan kegiatan penulis menghadapi beberapa masalah dan hambatan yang ada. Dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis juga berhasil mendapatkan banyak hal positif yang membantu penulis memiliki nilai tambah (*added value*) didalam dirinya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ISI

1. Pendahuluan

Lembaga Pendidikan merupakan sarana untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan membangun sumber daya manusia siap pakai dan professional dalam bidangnya masing-masing, sehingga sumber daya manusia mampu untuk meningkatkan wawasan serta memahami mengenai proses, kondisi dan masalah yang ada. Mahasiswa dituntut untuk menjadi mahasiswa yang cerdas dan mempunyai nilai tambah (*Added value*) agar bisa menghadapi persaingan yang ketat. Salah satu cara yang efektif dalam mencapai *added value* antara lain merupakan kegiatan magang.

Kegiatan magang merupakan proses pembelajaran mengenal kegiatan kerja dalam dunia nyata sehingga peserta magang dapat mempraktikkan keterampilan dalam dunia pekerjaan (Sumardino, 2014). Mahasiswa menunjukkan kemampuan dan keterampilan agar menjadi daya tarik bagi instansi pemerintah ataupun bagi perusahaan swasta, dengan begitu mahasiswa bisa memperbaiki diri dalam bekerja dan menjadi lebih kompetitif serta potensial. Dengan adanya kegiatan magang mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja dan mahasiswa dapat memahami serta memecahkan masalah yang muncul dalam dunia kerja.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis memilih untuk melakukan magang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara karena ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansi yang ada di pemerintahan dan melakukan perbandingan antara sistem akuntansi di sektor swasta dan instansi pemerintahan, setelah melaksanakan kegiatan magang tentunya peserta magang dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan memiliki pada masing-

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masing sektor seperti pada instansi pemerintahan sistem akuntansi yang hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa mencari keuntungan sedangkan akuntansi swasta usaha untuk mencapai laba atau profit yang dimaksimumkan dan peserta magang berniat untuk melanjutkan karir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penulis melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang berlokasi di kantor Bupati, Jl. Pusat Pemerintahan Bupati Malinau Blok D, Lt. I, Kabupaten malinau, Kalimantan utara. Magang dilaksanakan oleh penulis selama 3 bulan, mulai dari tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 November 2022. Penulis ditempatkan pada Bidang Akuntansi dengan harapan penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu dan teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan utara, Indonesia. Bumi intimung merupakan sebutan untuk Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau merupakan kota terluas di kalimantan utara sehingga menjadi ibu kota Kabupaten Malinau yang memiliki 15 kecamatan dan 109 desa. Wilayah pada hutan Kabupaten Malinau berbatasan dengan serawak, Malaysia.

Bagian Pengelolaan keuangan sekretariat Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Malinau No.10 tahun 2001 mengenai pembentukan bagian pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati Malinau 279 mengenai struktur organisasi dan tata kerja bagian pengelolaan keuangan. Bagian pengelolaan keuangan daerah mengikuti secara sinergis perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terlihat dalam perubahan. Pada Tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004 sistem administrasi daerah menggunakan sistem anggaran berimbang. Sedangkan pada tahun anggaran 2005 sampai dengan 2008 menggunakan sistem anggaran defisit atau anggaran berbasis kinerja. Bagian pengelolaan keuangan terdiri atas tiga sub bagian, yaitu sub bagian anggaran, bagian perbendaharaan dan bagian pembukuan.

3. Aktivitas Magang

3.1 Mengarsipkan Beberapa Dokumen

Peserta magang ditugaskan untuk mengarsipkan dokumen peraturan daerah, seperti pemberian stempel pada dokumen peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2022 Mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2022 Mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Dokumen peraturan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) setelah dokumen diberi stempel dan ditandatangani oleh bupati maka dokumen akan disimpan berdasarkan dengan tahun anggaran, dokumen di stempel dan ditandatangani agar peraturan disahkan. Jika data-data peraturan dibutuhkan maka dokumen akan dibukakan kembali.

Selanjutnya pengarsipan LRA pendapatan dan belanja daerah diSIPD, pengarsipan dilakukan untuk persiapan bahan rapat dan data akan disatukan agar memudahkan melihat data lebih cepat. Peserta magang terlebih dahulu diajarkan mengenai bagaimana cara login di SIPD

3.2 Melakukan Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Dana Desa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peserta magang diberi tugas untuk merekap realisasi penyaluran belanja dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data yang dibutuhkan dalam melakukan rekapitulasi penyaluran dana desa berupa nama desa, tanggal pengesahan, nomor pengesahan, nilai, dan keterangan. Rekapitulasi data dilakukan untuk memonitoring/memantau seluruh penyaluran dana yang sudah disahkan.

3.3 Melakukan Rekonsiliasi Terhadap Beberapa Dokumen

Rekonsiliasi (proses pencocokan data) antara rekening koran pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang dikeluarkan bank, rekening koran merupakan rangkuman semua aktivitas rekening transfer masuk dan keluar, debit atau kredit, yang diperlukan oleh bank atau nasabah pemegang rekening. Isi dari rekening koran merupakan laporan alur keluar masuk uang nasabah direkeningnya dalam kurun waktu tertentu sesuai permintaan. Tugas yang dilakukan oleh peserta magang untuk melakukan rekonsiliasi antara rekening koran yang dikeluarkan bank dengan rekap transaksi yang dilakukan pemerintah. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan atau keesalahan antara rekening koran rekap yang dilakukan oleh pemerintah dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh bank. Jika pada saat melakukan rekonsiliasi terdapat selisih atau kesalahan pada rekap pemda maka data yang dikeluarkan pemda akan direvisi. Setelah hasil rekonsiliasi antara data rekening koran pemda dan data rekening koran bank benar, maka akan dilanjutkan dengan merekonsiliasi rekening koran yang final dengan pendapatan LRA. Selanjutnya, Laporan rekening koran dan bukti fisik rekening koran akan dikembalikan kepada pegawai Bidang Akuntansi untuk dilakukan revisi.

Merekonsiliasi LRA belanja daerah di SIPD dengan pekerjaan manual, peserta magang diberikan tugas untuk merekonsiliasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara sistem SIPD dengan pekerjaann manual, jika menemukan selisih maka peserta magang akan memberi tanda pada pekerjaan manual.

3.4 Melengkapi Dokumen Rekonsiliasi LRA 2022

Peserta magang diminta untuk melengkapi dokumen Kegiatan Rekonsiliasi LRA yang ditujukan untuk OPD dan bendahara pengeluaran. Dokumen dilengkapi dengan cara mengisi nomor surat kegiatan rekonsiliasi LRA yang bisa didapatkan dari bidang tata usaha. Setelah nomor surat dilengkapi maka selanjutnya akan diberikan kepada kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk ditanda tangani. Apabila sudah diserahkan kepada kepala bidang bagian hukum untuk ditanda tangani, maka dokumen akan diserahkan ke ruang Sekretaris Daerah Bupati untuk ditanda tangani. Pada hari berikutnya peserta magang mengambil dokumen diruang Sekretaris Daerah Bupati dan surat akan di disebarakan ke OPD yang ada di Kabupaten Malinau untuk melakukan rekonsiliasi di bagian akuntansi.

3.3 Melakukan Pengarsipan Dokumen SP2D

Menurut buku Akuntansi Sektor Publik 2019 mengenai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. SP2D merupakan surat dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah. Peserta magang diberikan tugas untuk melengkapi judul PDF SP2D dari bulan juni hingga bulan Oktober, file SP2D dilengkapi agar lebih mudah untuk mencari nama OPD. File SP2D ditarik untuk diarsipkan dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bentuk *file softcopy*, *file* yang ditarik untuk mengantisipasi adanya file yang terhapus akibat sistem yang eror. Untuk file *hardcopy* SP2D yang sudah proses pencairan disimpan oleh bank, bidang perbendaharaan, dan masing-masing opd. Bidang akuntansi bertugas untuk menyimpan data sebagai arsip sehingga jika data SP2D diperlukan bisa ditemukan dengan mudah. Setelah peserta magang menyelesaikan tugas maka akan diberikan kepada pegawai Bidang Akuntansi.

4. Landasan Teori

4.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan serta penyajian hasilnya. Sektor Publik merupakan sektor yang mengelola dana masyarakat (Siregar, 2017). Organisasi pokok yang termasuk kategori sektor publik yang mengelola dana masyarakat merupakan pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain pemerintahan, berbagai organisasi lain juga dikategorikan sebagai organisasi sektor publik. Contoh organisasi lain yang termasuk bagian dari sektor publik merupakan perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat.

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintahan daerah ataupun informasi bagi publik (Indra Bastian dan Wuryan Andayani, 2007). Aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Penerapan mekanisme akuntansi pada organisasi pemerintahan bukan berarti bahwa akuntansi organisasi komersial sepenuhnya diterapkan pada organisasi pemerintahan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi, maka penerapan akuntansi pada organisasi pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada organisasi perusahaan. Teori akuntansi sektor publik berkaitan dengan aktivitas magang selama pelaksanaan kegiatan magang, dimana teori ini diterapkan dalam pemerintah daerah kabupaten malinau.

4.2 Pengelolaan keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan proses pencatatan serta pengidentifikasi laporan keuangan suatu pemerintah daerah yang menjadikan laporan keuangan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan dari pihak-pihak entitas pemerintah daerah (Halim, 2002). Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah merupakan keuangan daerah. Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelolaa keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Teori pengelolaan keuangan daerah sangat berkaitan dengan pemerintahan terutama pada BPKD dimana keuangan yang dikelola sesuai dengan perundang-undangan sehingga peserta magang mengambil teori ini sebagai pedoman dalam penyusunan laporan tugas akhir.

4.3 Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan memberikan informasi kepada pembuat keputusan yang berada diluar untuk bisnis (*Financial Accounting*, 2019). Proses akuntansi keuangan terdiri dari:

1. Mengkategorikan transaksi dan peristiwa masa lalu
2. Mengukur atribut yang dipilih dari transaksi dan peristiwa tersebut, dan
3. Mencatat dan meringkas pengukuran tersebut.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang melakukan pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksud merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan dalam rangka yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah pusat mengelola seluruh inti dari akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kegiatan jasa berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan mengenai entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan (Harahap, 2016). Akuntansi juga merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dalam kedua definisi tersebut peserta magang dapat menyimpulkan bahwa peran akuntansi merupakan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai 'entitas' ekonomi dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Teori akuntansi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan magang pada BPKD dimana tugas yang diberikan kepada peserta magang dalam melakukan pengidentifikasian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sehingga teori ini di ambil sebagai pedoman dalam menyusun laporan tugas akhir.

4.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan pelaporan mengenai kondisi keuangan pada periode tertentu (Kasmir, 2017). Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006).

Laporan keuangan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan selama periode tertentu, pencatatan keuangan digunakan untuk informasi bagi perusahaan (Baridwan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1996). Laporan keuangan daerah memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada para pengguna mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan yang secara khusus untuk menyajikan informasi dan laporan keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan keakuntabilitas suatu entitas yang ditujukan kepada sumber daya yang dipercayakan. Teori Laporan Keuangan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan peserta magang pada BPKD seperti pengecekan laporan realisasi anggaran di sistem SIPD sehingga teori ini diambil sebagai pedoman dalam penyusunan tugas akhir. Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Pemerintah, 2019).

2. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penyajian informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dimana dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas mempunyai referensi silang informasi terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain diharuskan untuk mengungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. Kesimpulan

kesimpulan yang bisa ditarik peserta magang selama melaksanakan kegiatan magang, antara lain:

- 1) Peserta magang mendapat pengalaman dan menambah wawasan dalam bekerja pada Instansi Pemerintahan. Mulai dari berkomunikasi, bersikap, serta mempelajari dan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada kantor BPKD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
- 2) Peserta magang mempelajari pentingnya kantor badan pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu pemerintahan yang ada di Kabupaten Malinau dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi proses pemeriksaan laporan realisasi anggaran yang tersedia pada aplikasi SIPD, sehingga peserta magang mengetahui bagaimana cara memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada aplikasi SIPD.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) Meskipun terdapat beberapa kendala dalam kegiatan magang yang telah dilaksanakan seperti permasalahan dalam koneksi jaringan yang kurang stabil, ketidakhadiran peserta rekonsiliasi LRA, ketidakdisiplinan pegawai pemerintah daerah, keterlambatan penyerahan dokumen dan kurangnya pemahaman pada SIPD. Permasalahan yang terkait memiliki solusi untuk mengatasinya dengan cara melakukan perbaikan secara berkala untuk menjaga stabilitas koneksi untuk menghindari *server down*, diharapkan peserta rekonsiliasi datang lebih cepat untuk melakukan penanganan jika menemukan permasalahan saat merekonsiliasi, dan sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Malinau lebih sering melakukan evaluasi terhadap pegawai-pegawainya selanjutnya pemerintah sebaiknya mengadakan pelatihan penggunaan SIPD agar tidak ada kesalahpahaman dalam penggunaannya.

6. Refleksi Diri

Setelah kegiatan magang yang telah dilaksanakan, peserta magang mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Melalui kegiatan magang selama tiga bulan banyak hal positif yang didapat oleh peserta magang. Hal-hal yang positif dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dikemudian hari.

Hal positif yang pertama didapat peserta magang ialah dapat mengerjakan semua tugas dengan hati-hati serta mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Dalam melaksanakan kegiatan magang, banyak memberikan pembelajaran bagi peserta magang dalam mengerjakan tugas dengan baik yang harus dilakukan dengan kehati-hatian serta ketelitian agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Contohnya tugas dalam merekap data pendapatan dan belanja dana desa, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menginput

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nama desa, tanggal pengesahan, nomor pengesahan dan nilai. Jika tidak melakukan tugas dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian maka data yang diinput akan salah dan ada data yang terlewatkan.

Hal positif yang kedua yang didapat oleh peserta magang ialah peserta magang dapat belajar mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Dengan adanya kegiatan magang ini, mengajarkan peserta magang dalam mengatur waktu dan mengajarkan peserta magang untuk disiplin terhadap waktu agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Contoh dalam hadir ke kantor dengan tepat waktu, jarak antara kantor dengan tempat tinggal yang sangat jauh sehingga peserta magang harus lebih awal untuk berangkat ke kantor agar tidak terlambat dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal positif selanjutnya ialah peserta magang mendapat banyak pengalaman dan menambah wawasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru dan menambah wawasan dalam berkomunikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan magang tersebut, menjadikan kepercayaan diri peserta magang lebih tinggi serta menjadikan peserta magang memperhatikan sikap dan beretika dalam berkomunikasi secara langsung. Contohnya ketika mengantarkan surat di ruang ketua BPKD dan sekretaris Bupati serta meminta nomor surat di ruang Tata Usaha, bidang hukum dan di ruang bidang umum, hal yang harus diperhatikan ialah mengetuk pintu sebelum masuk dan wajib memberikan salam terlebih dahulu sesuai dengan waktu dan menyebutkan divisi serta menyebutkan tujuan. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan ialah nada berbicara harus terdengar ramah agar terdengar sopan dan menciptakan suasana yang nyaman.

Semua hal-hal positif yang didapat oleh peserta magang akan berdampak baik bagi peserta magang dikemudian hari. Setelah melaksanakan kegiatan magang, memberikan banyak hal-hal baru dan pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan oleh peserta magang sebelumnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melalui kegiatan magang yang sudah dilaksanakan peserta magang juga berharap agar semua pengalaman dan pengetahuan menjadi bekal gambaran saat mulai memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Z. (1996). *Intermediate Accounting* Vol. 7.

Financial Accounting. (2019).

Harahap. (2016). *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*.

Standar Akuntansi Pemerintah, (2019).

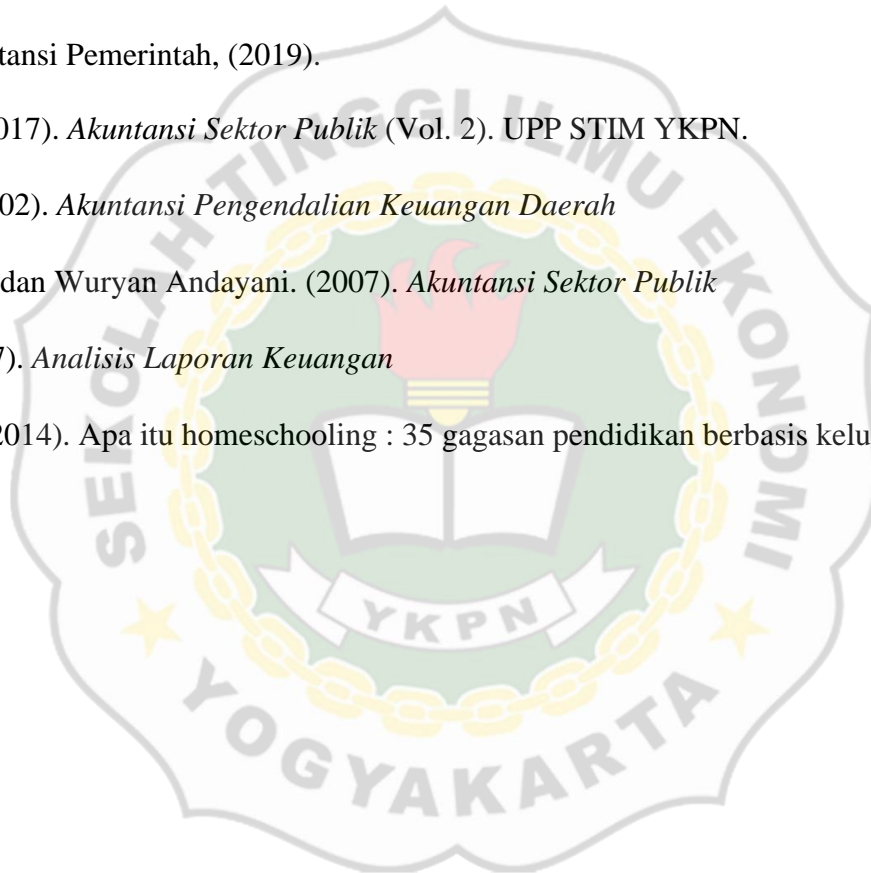
Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (Vol. 2). UPP STIM YKPN.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*

Indra Bastian dan Wuryan Andayani. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*

Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*

Sumardino. (2014). Apa itu homeschooling : 35 gagasan pendidikan berbasis keluarga.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

